

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini, pelaporan keuangan sangat diperlukan oleh para pemakai laporan keuangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan salah satu bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaporan keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Akuntabilitas menjadi tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Pada saat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, maka salah satu dilakukannya adalah menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu kepada pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009: 20).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan adalah upaya dengan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan harus disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ketepatanwaktuan.

Laporan keuangan dapat memberikan informasi, apabila memenuhi salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Adapun karakteristik kualitatif keuangan pemerintah yang merupakan persyaratan normatif sebagaimana disebutkan dalam rerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual antara lain :

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
 - a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dapat dicegah.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dari karakteristik tersebut, ketepatanwaktuan merupakan salah satu faktor yang relevan untuk menentukan relevansi laporan keuangan, maka tidaklah mungkin laporan keuangan relevan tanpa adanya ketepatanwaktuan. Oleh karena itu, ketepatanwaktuan sangat penting dalam pelaporan keuangan pemerintah. Ketepatanwaktuan adalah kepastian atau kesepakatan waktu yang direncanakan terhadap hasil yang diberikan sehingga laporan keuangan tersebut dapat tersedia sangat dibutuhkan. Ketepatanwaktuan merupakan kualitas yang berkaitan dengan ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan. Menurut, Mardiasmo (2009: 146) “Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut”. Kendala ketepatanwaktuan penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan. Permasalahannya adalah semakin banyak kebutuhan informasi, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut. Laporan keuangan mungkin disajikan tidak tepat waktu sehingga tidak relevan untuk pengambilan keputusan meskipun disajikan lebih awal.

Kebutuhan akan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan secara jelas telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan bahwa ketepatanwaktuan merupakan salah satu karakteristik yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pembuat keputusan. Informasi akan mempunyai manfaat jika disampaikan tepat waktu kepada para pemakainya untuk pengambilan keputusan. Informasi yang sudah lama dapat mengurangi nilai tambahnya bagi para pengguna informasi laporan keuangan tersebut. Pelaporan keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu dapat mengurangi tingkat kebocoran dan tingkat penyimpangan lainnya.

Hal pertama yang mungkin mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah kualitas sumber daya manusia (Ariesta, 2013). Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam menyampaikan laporan keuangan daerah. Rendahnya kualitas SDM dalam sistem akuntansi membuat penyampaian laporan keuangan tidak tepat waktu. Sumber daya manusia dalam menyajikan laporan keuangan dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan di bidang akuntansi. Mardiasmo (2002:146) menyebutkan bahwa “sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu”.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi (Trisaputra, 2013). Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi

yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Menurut Jogiyanto (2005:10) bahwa informasi yang tepat waktu yaitu informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Bila informasi terlambat dalam penyampaiannya, maka akan berdampak fatal dalam pengambilan keputusan bagi organisasi.

Dewasa ini mahalnya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut di dapat, sehingga diperlukan teknologi-teknologi muktahir untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkannya. Penyampaian laporan keuangan dapat tepat waktu apabila sumber daya manusia dapat memanfaatkan teknologi informasi secara efektif, maksimal dan optimal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Andriani, 2010).

Hal ketiga yang mungkin mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern pemerintah (Sembiring, 2013). Sistem pengendalian intern juga dibutuhkan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan organisasinya. Pemerintah daerah melakukan pengendalian untuk dapat memantau pelaksanaan kegiatan sehingga lebih menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lemahnya SPI

mengakibatkan penyampaian laporan keuangan daerah menjadi tidak tepat waktu. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pemerintahan. Salah satu tujuan dibangunnya sistem pengendalian internal adalah untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal. Instansi pemerintahan harus membangun dan memiliki sistem pengendalian yang baik (PP No. 60 Tahun 2008). Melalui kegiatan yang efektif dan efisien dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, maka suatu organisasi dapat menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu. Jika penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berjalan dengan baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat disajikan dengan tepat waktu. Begitu juga sebaliknya jika penerapan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak tepat waktu.

Adapun fenomena yang terjadi pada salah satu SKPD Provinsi Sumatera Utara yaitu pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) ditemukan lambatnya penyiapan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah menghambat penyerapan APBD Provinsi Sumatera Utara (www.waspada.co.id, 07 Desember 2013). Hal ini disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, teknologi

informasi yang kurang dimanfaatkan dan lemahnya sistem pengendalian intern dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.

Ini akan mengakibatkan ketidaktepatwaktuan pelaporan keuangan Dinas Tata Ruang Dan Permukiman (Tarukim). Ketidaktepatwaktuan pelaporan keuangan Dinas Tata Ruang Dan Permukiman (Tarukim) juga akan berdampak pada Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan diserahkan kepada BPK RI Sumatera Utara untuk diperiksa.

Permasalahan lain yang terdapat pada pemerintah provinsi sumatera utara yaitu Keterlambatan nota pengantar keuangan APBD Sumatera Utara TA 2014, bukti kinerja gubernur Sumatera Utara, gatot belum maksimal. Keterlambatan nota keuangan tersebut akan mempengaruhi lambatnya laju perekonomian khususnya di kabupaten atau kota dan umumnya provinsi sumatera utara. Lambatnya nota keuangan APBD Sumatera Utara 2014, bukti kinerja pemprov su tidak maksimal (Madya pos.com, 11 Desember 2013). Hal ini akan berdampak pada pelaporan keuangan pemerintah provinsi sumatera utara menjadi tidak tepat waktu. Ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual bahwa salah satu karakteristik laporan keuangan yang relevan adalah tepat waktu.

Ariesta (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD di Kabupaten Pasaman Barat bahwa Kualitas Sumber Daya

Manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kabupaten Pasaman Barat .

Trisaputra (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat) bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sementara, Prapto (2010) meneliti tentang Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Sragen bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Prapto (2010) meneliti tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Sragen bahwa pengendalian intern Akuntansi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi pengendalian intern dalam instansi pemerintah maka dapat meningkatkan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan sesuai dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peneliti mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Ariesta (2013) tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan keuangan

pemerintah daerah pada SKPD di kabupaten pasaman barat. Hasil pada penelitian terdahulu yaitu bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi pengendalian intern akuntansi tidak diteliti dalam ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah, melainkan pengendalian intern akuntansi pengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan daerah. Perbedaan pada penelitian terdahulu adalah terletak pada waktu, tempat, variabel dependen dan independen.

Adapun alasan mereplikasi penelitian ini karena penelitian sebelumnya dilaksanakan pada SKPD di Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera. Peneliti mengganti pengendalian intern akuntansi menjadi sistem pengendalian intern pemerintah dan memasukkan dalam penelitian, dikarenakan menurut penelitian terdahulu lainnya (Prapto, 2010) bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan data dan fakta diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara empiris yaitu: “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan hal sangat penting dalam sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengidentifikasi masalah beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah yang akan berdampak buruk bagi kinerja pemerintah dalam pengambilan keputusan.
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pada pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi pada pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah pada pelaporan keuangan pemerintah daerah

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini dilakukan untuk mengarahkan dan memudahkan dalam penelitian yang terfokus sistematis, Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

1.5 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis, Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta akan memberikan pengalaman dalam pengembangan kemampuan ilmiah khususnya pada penelitian tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang menghasilkan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu.

3. Bagi Akademis, dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas.



THE
Character Building
UNIVERSITY